

Nomor : 5472/Pusdiklat/03/2022 10 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Sosialisasi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1

Yth. **Kepala Unit Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga (Daftar Terlampir)**
di Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) beserta peraturan turunannya, Pusdiklat PBJ LKPP secara adaptif melakukan penyesuaian terhadap Program Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1. Agar dapat digunakan secara optimal dan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan, Pusdiklat PBJ LKPP akan melakukan kegiatan Sosialisasi Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level-1. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara atau menugaskan perwakilan untuk hadir dalam kegiatan yang akan diselenggarakan, pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 18 Maret 2022
Jadwal : Terlampir
KAK Kegiatan : Terlampir
Tempat : *Online*
Agenda : Sosialisasi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1
Link Rapat : <https://us06web.zoom.us/j/89406606408?pwd=OW1BT2NBVm9ScnZpN1cxNFRudHpLZz09> Meeting ID: 894 0660 6408 Passcode: 812298

Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nofrina Liza (0812-7787-5811).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Hardi Afriansyah

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Yn8h00
Nomor Tiket : SK202203100008

Peserta Undangan

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Luar Negeri
4. Kementerian Pertahanan
5. Kementerian Hukum dan HAM
6. Kementerian Keuangan
7. Kementerian Energi dan SDM
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian Perdagangan
10. Kementerian Pertanian
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Kementerian Ketenagakerjaan
15. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
16. Kementerian Kesehatan
17. Kementerian Sosial
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah
20. Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi
21. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
22. Kementerian Pariwisata
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika
24. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Pemuda dan Olahraga
31. Mahkamah Agung
32. Badan Pemeriksa Keuangan
33. Komisi Pemberantasan Korupsi
34. Komisi Yudisial
35. Komisi Pemilihan Umum
36. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
37. Komisi Nasional Hak Asasi Nasional
38. Komisi Perlindungan Anak
39. Komisi Ombudsman
40. Arsip Nasional Republik Indonesia
41. Badan Intelijen Negara
42. Badan Kepegawaian Negara
43. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
44. Badan Koordinasi Penanaman Modal
45. Badan Informasi Geospasial
46. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Yn8h00
Nomor Tiket : SK202203100008

47. Badan Narkotik Nasional
48. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
49. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
50. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
51. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
52. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
53. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
54. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
55. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
56. Badan Pertahanan Nasional
57. Badan Pusat Statistik
58. Badan SAR Nasional
59. Badan Standarisasi Nasional
60. Badan Tenaga Nuklir Nasional
61. Lembaga Administrasi Nasional
62. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
63. Lembaga Ketahanan Nasional
64. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
65. Lembaga Sandi Negara
66. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
67. Markas Besar TNI
68. Markas Besar Polri



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

Token : Yn8h00
Nomor Tiket : SK202203100008